

TESIS

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN BPJS DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

***PROTECTION AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR BPJS
PATIENT MEDICAL RECORDS IN THE PERSPECTIVE OF
LEGAL CERTAINTY***



Oleh:
CLARITA AYU PUTRI SETYA
NIM. 2210622018

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN BPJS DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

***PROTECTION AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR BPJS
PATIENT MEDICAL RECORDS IN THE PERSPECTIVE OF
LEGAL CERTAINTY***



**Oleh:
CLARITA AYU PUTRI SETYA
NIM. 2210622018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN BPJS DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
CLARITA AYU PUTRI SETYA
NIM. 2210622018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

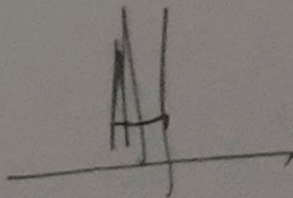
PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN BPJS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:
CLARITA AYU PUTRI SETYA
NIM. 2210622018

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 05 April 2024

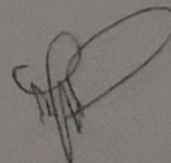
Menyetujui :

Pembimbing 1



Dr. dr. Abdul Kolib, MH
NIDN.0019087805

Pembimbing 2



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., CLA
NIDN.0019126303

TESIS

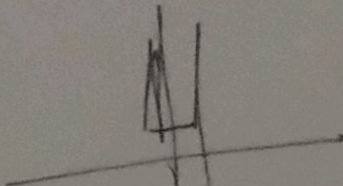
PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
HUKUM TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN BPJS DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Disusun dan diajukan oleh
CLARITA AYU PUTRI SETYA
NIM. 2210622018

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelsaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 05 April 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

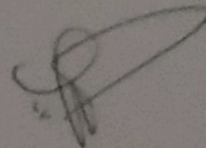
Menyetujui:

Pembimbing 1

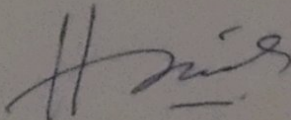


Dr. dr. Abdul Kolib, MH
NIDN.0019087805/Lektor.
Koordinator Program Studi Magister
Hukum

Pembimbing 2



Dr. Handovo Prasetyo, SH., MH., CLA
NIDN.0019126303/Lektor Kepala.
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes
NIDN.0028049301/Lektor.



Dr. Suberman, S.H., LL.M
NIP.197006022021211004/Lektor
Kepala

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Clarita Ayu Putri Setya

NIM : 2210622018

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian Tesis yang Berjudul **Perlindungan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Rekam Medik Pasien BPJS Dalam Perspektif Kepastian Hukum** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 05 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Clarita Ayu Putri Setya
NIM. 2210622018

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clarita Ayu Putri Setya
NIM : 2210622018
Program Studi : Magister Hukum Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN BPJS DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/informasikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap tercantumnya nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 April 2024
Yang menyatakan,



(Clarita Ayu Putri Setya)

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis berjudul “Perlindungan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Rekam Medik Pasien BPJS Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Tesis ini diajukan untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Hukum.

Dalam penulisan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., MH., M. Tr.Adm.Kes., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Dosen Penguji yang telah memberikan masukan.
4. Bapak Dr. dr. Abdul Kolib, MH selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta arahan selama bimbingan tesis.
5. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., CLA selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta arahan selama bimbingan tesis.
6. Ibu Dr Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan.
7. Ibu dr. Ida Ayu Purwaningsih, MARS selaku Corporate Rumah Sakit yang telah mengizinkan dan mendukung saya dalam menyelesaikan studi Magister Hukum.

8. Ibu dr. Novita Widyawaty D., M.Sc., MARS, FISQUA selaku Direktur Primaya Hospital Pasar Kemis yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Primaya Hospital Pasar Kemis
9. Bapak Tony Sebastian, S.E., CHRM selaku Kadiv HRGA Primaya Hospital Pasar Kemis yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.
10. Kedua Orangtua tercinta, yang selalu merestui langkahku untuk berpendidikan.
11. Keluarga dan Sahabat-Sahabat yang telah memberi dukungan dan semangat agar Penulis dapat menyusun tesis dengan tepat waktu.

Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu dalam bidang hukum dan kesehatan masyarakat. Penulis tahu bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penulisan.

Jakarta, 05 April 2024

Clarita Ayu Putri Setya

ABSTRAK

Clarita Ayu Putri Setya (NIM 2210622018). Perlindungan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Rekam Medik Pasien BPJS Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Abdul Kolib, Handoyo Prasetyo.

Rekam medis sebagai sebuah rehasiaan menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan untuk merahasiakan data kesehatan pasien yang ditanganinya. Akan tetapi, Pada Tahun 2021 terjadi kebocoran data dari pasien kepesertaan BPJS Kesehatan, dimana terdapat 279 juta catatan informasi data pribadi pasien BPJS Kesehatan tersebar dan diperjualbelikan pada *Raid Forums*. Kemudian kembali terjadi pada awal Tahun 2022, dimana sekitar enam juta data rekam medis pasien Covid-19 yang dijual di situs *Raid Forums*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguraikan implementasi regulasi rekam medik pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku serta untuk menganalisa dan menguraikan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum terhadap rekam medik pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris (*Socio-Legal*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi rekam medik pasien BPJS diatur melalui UU Kesehatan dan secara teknis dilaksanakan dengan dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam UU Kesehatan hanya memberikan tanggungjawab melindungi data rekam medis namun tidak mengatur ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan data rekam medis yang dapat terjadi. Sementra itu, dalam Permenkes 24 Tahun 2022 tersebut terdapat kondisi yang sulit untuk dibedakan terkait dengan pertanggungjawaban dari Kementerian Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit terkait dengan Pembukaan Data rekam Medis sebab sanksi hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, rekam medis pasien dapat didistribusikan oleh RS kepada pihak penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS), namun BPJS kesehatan tidak termasuk dalam pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya perlindungan terhadap data rekam medis hingga kebocoran data rekam medis baik merujuk pada UU BPJS, UU SJSN, hingga Permenkes 24 Tahun 2022. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum terhadap rekam medik pasien badan penyelenggara jaminan sosial dalam perspektif kepastian hukum saat ini belum terwujudkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit dan BPJS berada pada beban kewajiban yang sama atas perlindungan dan pertanggungjawaban kebocoran atas data rekam medik peserta BPJS. Selanjutnya disarankan agar penegasan terhadap upaya memwujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pertanggungjawaban data rekam medik pasien adalah dengan melakukan perbaikan beberapa regulasi seperti UU PDP maupun dalam UU BPJS yang bertujuan untuk menekankan pentingnya perlindungan data rekam medik pasien.

Kata Kunci : Rekam Medis, BPJS, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Clarita Ayu Putri Setya (NIM 2210622018). Legal Protection and Accountability for BPJS Patient Medical Records in the Perspective of Legal Certainty. Abdul Kolib, Handoyo Prasetyo.

Medical records as a matter of confidentiality are the responsibility and obligation of every medical and health worker to keep the health data of the patients they treat confidential. However, in 2021 there was a data leak from patients participating in BPJS Health, where there were 279 million records of personal data information about BPJS Health patients spread and traded on Raid Forums. Then it happened again at the beginning of 2022, where around six million medical records of Covid-19 patients were sold on the Raid Forums site. This research aims to analyze and describe the implementation of the Social Security Administering Agency's patient medical record regulations based on applicable provisions and to analyze and outline legal protection and accountability for the Social Security Administering Agency's patient medical records from the perspective of legal certainty. This research uses empirical normative legal methods (Socio-Legal). The results of the research show that the implementation of BPJS patient medical record regulations is regulated through the Health Law and technically implemented on the basis of Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records. The Health Law only provides responsibility for protecting medical record data but does not regulate provisions for sanctions against misuse of medical record data that may occur. Meanwhile, in Minister of Health Regulation 24 of 2022 there are conditions that are difficult to differentiate regarding the responsibility of the Ministry of Health and Hospitals regarding the Opening of Medical Record Data because sanctions are only given to health facilities. Furthermore, patient medical records can be distributed by hospitals to health insurance providers (BPJS), however BPJS Health is not included in the party responsible for the protection of medical record data and leakage of medical record data, whether referring to the BPJS Law, the SJSN Law, to Minister of Health Regulation 24 of 2022. Researchers conclude that the policy of protection and legal accountability for patient medical records of social security administering bodies from the perspective of legal certainty has not yet been fully realized. Therefore, the hospital and BPJS are under the same obligation to protect and account for leaks of BPJS participant medical record data. Furthermore, it is recommended that efforts to achieve legal certainty in the protection and accountability of patient medical record data be confirmed by improving several regulations such as the PDP Law and the BPJS Law which aims to emphasize the importance of protecting patient medical record data.

Keywords: Medical Records, BPJS, Legal Protection, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinal Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Teori Negara Hukum.....	15
2. Teori Kepastian Hukum.....	18
B. Kerangka Pikir.....	21
C. Definisi Operasional.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29

C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Implementasi Regulasi Rekam Medik Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku.....	34
B. Kebijakan Perlindungan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Rekam Medik Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Perspektif Kepastian Hukum.....	63
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Orisinalitas Penelitian.....13